

BAB I

PENDAHULUAN

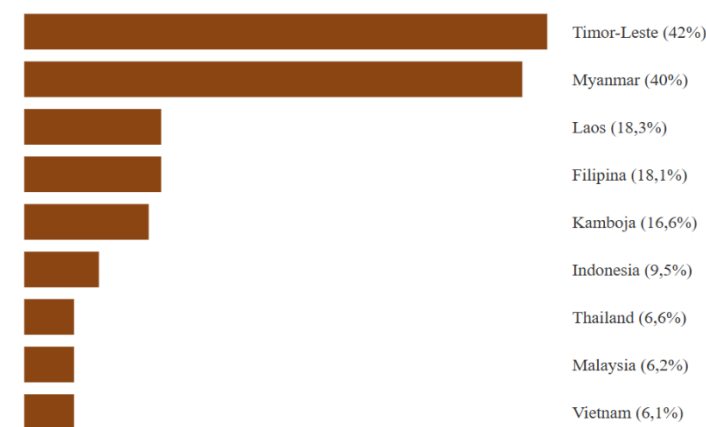
1.1 Latar Belakang

Fenomena kemiskinan merupakan tantangan multidimensional mencakup aspek sosial dan ekonomi yang sangat kompleks, memerlukan pendekatan komprehensif serta strategi penanganan yang terstruktur untuk mencapai resolusi yang efektif. Merujuk pada definisi yang dikeluarkan Bank Dunia, kemiskinan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu kondisi keterbatasan akses terhadap berbagai pilihan dan peluang dalam pemenuhan kebutuhan fundamental, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, standar hidup yang memadai, kebebasan individual, martabat, serta pengakuan sosial yang setara dengan anggota masyarakat lainnya. (Pritchett, 2006).

Sejalan dengan kompleksitas tersebut, pemahaman lebih mendalam tentang dimensi kemiskinan menunjukkan bahwa fenomena ini tidak dapat direduksi menjadi sekadar persoalan finansial semata. Dalam penelitian (Hick, 2012) Teori Kemampuan Amartya Sen menjelaskan kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kekurangan pendapatan, tetapi juga ketidakmampuan individu untuk mencapai kapabilitas dasar. Sehingga, menangani kemiskinan secara holistik memerlukan penerapan kebijakan yang memprioritaskan tidak hanya peningkatan pendapatan, tetapi juga akses yang adil dan mendasar manusia seperti kebutuhan pangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan mendasar lainnya. Pendekatan

semacam itu berkontribusi pada pemahaman multidimensi tentang kemiskinan dan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kompleksitas permasalahan kemiskinan ini tercermin dari prevalensinya yang bersifat universal, mengindikasikan bahwa tidak ada satu negara pun yang sepenuhnya bebas dari problematika ini. Bahkan Amerika Serikat, yang dikategorikan sebagai negara adidaya dengan kapasitas ekonomi yang superior, masih menghadapi tantangan kemiskinan, meskipun dalam skala yang relatif lebih terkendali dibandingkan dengan negara-negara berkembang.

Sebagai kawasan dengan mayoritas negara-negara yang ada di Asia tenggara masih berstatus negara berkembang permasalahan kemiskinan terus saja menyelimuti negara-negara ini, walaupun pada kenyataannya setiap negara memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda-beda.



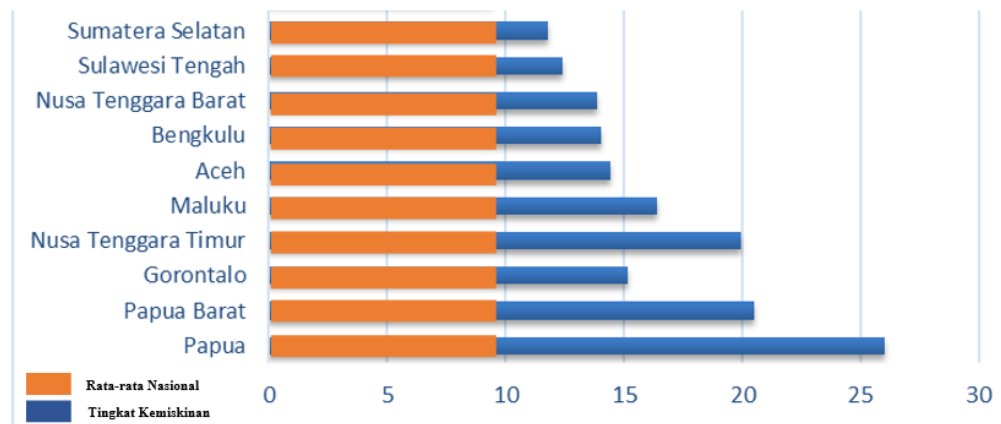
Sumber : Goodstats.com

Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan Negara Kawasan Asia Tenggara Tahun 2023 (%)

Tingkat kemiskinan di Asia Tenggara bervariasi, dengan Timor-Leste mencatat angka tertinggi sebesar 42%, diikuti Myanmar dengan 40%. Negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam memiliki angka di bawah 7%, sementara Brunei dan Singapura menunjukkan tingkat kemiskinan yang sangat rendah, di bawah 3% dan 1%. Kesenjangan ini mencerminkan perbedaan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Indonesia, dengan tingkat kemiskinan mencapai 9,5%, menempatkannya di peringkat keenam, dan meskipun lebih rendah dibandingkan negara-negara di atasnya, tantangan kemiskinan tetap signifikan dan memerlukan perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun tingkat kemiskinan Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara, permasalahan kemiskinan di negara ini memiliki kompleksitas yang jauh melampaui sekadar angka statistik. Masalah kemiskinan di Indonesia sangat kompleks bukan hanya disebabkan oleh kekurangan pendapatan, tetapi juga oleh ketidakmampuan sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, gizi yang cukup hingga infrastruktur yang memadai. Selain itu, ketidakmerataan pembangunan yang masih terjadi antarwilayah turut memperburuk kondisi ini. Seiring dengan itu, rendahnya kualitas sumber daya

manusia, baik dari aspek intelektual maupun fisik, menjadi salah satu dampak yang paling mencolok, yang akhirnya menurunkan produktivitas dan memperparah masalah kemiskinan. (D. Kurniawan, 2015).



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 2 Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2023 (%)

Grafik 1.2 menunjukkan tingkat kemiskinan di berbagai provinsi di Indonesia, yang masih jauh di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Provinsi-provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Aceh, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan. Dari grafik, terlihat bahwa Papua dan Papua Barat memiliki tingkat kemiskinan yang paling tinggi, jauh melampaui rata-rata nasional, yang menunjukkan tantangan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan perbedaan yang mencolok memiliki kondisi sosial-ekonomi lebih baik. Misalnya, Jawa Barat

mencatat tingkat kemiskinan sebesar 7,62%, Banten dengan 6,17%, dan DKI Jakarta yang paling rendah dengan 4,44%. Perbedaan ini menggambarkan kesenjangan yang signifikan dalam distribusi kemakmuran dan pembangunan antar wilayah di Indonesia, yang menegaskan perlunya strategi pembangunan yang lebih inklusif dan merata untuk mengurangi disparitas ekonomi yang ada.

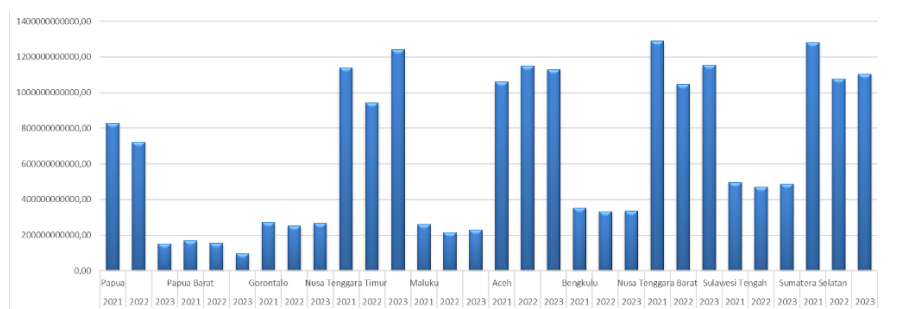
Fenomena ini menggambarkan kondisi disparitas pendapatan masyarakat. Selain pendapatan masyarakat yang rendah hasil ini pun diperparah dengan terbatasnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur yang memadai. Bahkan, di beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Timur dan Maluku, meskipun ada penurunan tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan tersebut masih tetap tinggi, menunjukkan bahwa tantangan struktural dalam mengatasi kemiskinan belum sepenuhnya teratasi. Ditambah dengan masalah pemenuhan gizi yang layak, yang menjadi isu besar di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, fenomena ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai.

Untuk mencapai tujuan tersebut, peran pemangku kebijakan menjadi sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan pengeluaran publik dapat secara langsung berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan penelitian (Maku et al., 2020) mengungkapkan bahwa dalam Teori Keynesian pengeluaran pemerintah yang tepat dapat meningkatkan permintaan agregat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam hal

ini, peningkatan pengeluaran publik untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya dapat menciptakan efek multiplier yang signifikan terhadap perekonomian. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya beli masyarakat miskin, tetapi juga memperluas permintaan barang dan jasa, yang mendorong peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, efektivitas kebijakan pengeluaran publik ini sangat bergantung pada implementasi yang tepat sasaran dan bebas dari hambatan distribusi. Ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran dapat mengurangi dampak positif dari kebijakan ini terhadap pengurangan kemiskinan (Ricardo Parera et al., 2022).

Dalam mengukur kemiskinan, tingkat kemiskinan menjadi indikator kunci untuk menilai efektivitas kebijakan pembangunan, terutama di negara-negara berkembang. Indikator ini memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengukur dampak langsung dari program-program terhadap kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pendekatan serupa juga diterapkan, di mana tingkat kemiskinan menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan kebijakan sosial dan ekonomi. Pemerintah Indonesia secara rutin menggunakan data tingkat kemiskinan untuk mengevaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan indikator ini membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta alokasi sumber daya yang lebih efisien untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi di berbagai daerah, seperti dijelaskan dalam artikel yang ditulis oleh Augustin Kwasi Fosu dalam *Bulletin of the World Health Organization* (Fosu, 2007).

Dalam menangani masalah kemiskinan ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan program salah satunya yaitu Bantuan Sosial Pangan Non-Tunai, Program ini memiliki dampak positif dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, masalah seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan distribusi, dan kualitas bahan sembako yang rendah mengurangi efektivitas program. Meskipun tingkat kemiskinan menurun pada periode 2017-2019, nilai bantuan sosial yang terus meningkat tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan aktual, sehingga diperlukan pembaruan regulasi dan perbaikan mekanisme distribusi (Yulianto Unhan & Yudho Prakoso, 2022).



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan Tahun 2021-2022

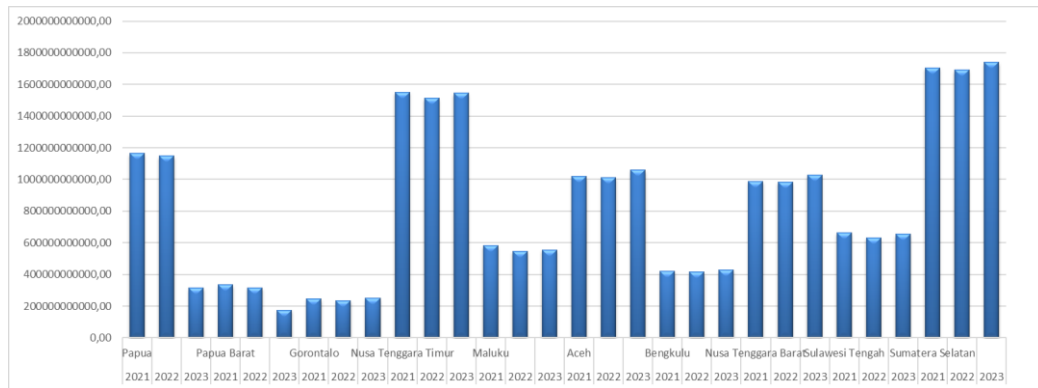
Gambar 1. 3 Anggaran BPNT Tahun 2021-2023 di 10 Provinsi Termiskin (Rupiah)

Pada gambar 1.3 di atas menunjukkan fluktuasi anggaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dialokasikan ke 10 provinsi termiskin di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023. Setiap provinsi mengalami variasi signifikan dalam alokasi anggaran, dengan beberapa provinsi seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan menerima anggaran yang sangat besar pada tahun-tahun tertentu, terutama pada tahun 2021 dan 2022. Puncak-puncak anggaran yang tinggi

di beberapa provinsi ini mencerminkan prioritas pemerintah untuk memberikan bantuan lebih besar dalam menghadapi tantangan ekonomi di wilayah-wilayah yang lebih miskin. Namun, meskipun ada lonjakan besar, beberapa provinsi seperti Aceh dan Bengkulu menunjukkan fluktuasi yang lebih stabil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan besar dalam kebutuhan dan alokasi bantuan, setiap provinsi menghadapi tantangan yang unik dalam upaya mengurangi kemiskinan

Selain program-program bantuan sosial, akses pendidikan juga memainkan peran krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai kebijakan utama. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Menurut Amartya Sen, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kekurangan pendapatan, tetapi juga ketidakmampuan individu untuk mencapai kapabilitas dasar seperti akses terhadap pendidikan. Dana BOS sebagai intervensi pemerintah, secara langsung meningkatkan akses tersebut, terutama melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Dana BOS memungkinkan sekolah-sekolah di daerah terpencil dan miskin untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik, termasuk pembelian buku, alat peraga, serta biaya operasional lainnya. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, dana BOS berkontribusi pada peningkatan tingkat pendidikan dan keterampilan siswa, yang pada gilirannya membuka peluang kerja dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tantangan dalam distribusi yang tidak merata, serta keterbatasan

dalam pengawasan dan transparansi penggunaan dana yang dapat mempengaruhi dampak positifnya terhadap pengurangan kemiskinan (Grasiano et al., 2020).



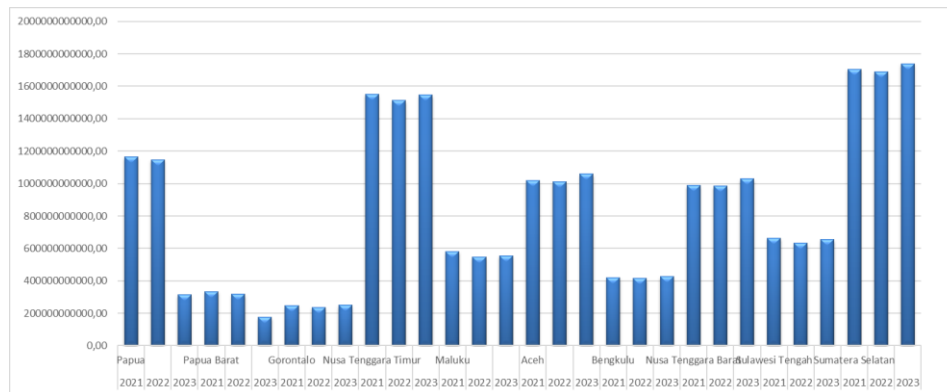
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan Tahun 2021-2023

Gambar 1. 4 Anggaran BOS Tahun 2021-2023 di 10 Provinsi Termiskin (Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.4 Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia terus meningkat dari 2018 hingga 2023, namun dampaknya terhadap penurunan tingkat kemiskinan tidak merata di setiap provinsi, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendanaan pendidikan belum cukup signifikan dalam mengurangi kemiskinan secara keseluruhan. Sebagai contoh, Papua mengalami kenaikan BOS sebesar 90% dari Rp607,37 miliar pada 2018 menjadi Rp1,16 triliun pada 2021, namun penurunan tingkat kemiskinan hanya sebesar 1% dari sekitar 27% menjadi 26%. Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menerima alokasi BOS stabil sekitar Rp1,5 triliun per tahun juga menunjukkan tren serupa, dengan tingkat kemiskinan yang turun minimal dari 21% pada 2018 menjadi sekitar 20% pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan, meskipun penting, tidak cukup untuk menurunkan kemiskinan di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses pasar. Sebaliknya, Sumatera Selatan dengan alokasi BOS yang serupa

misalnya, Rp1,54 triliun pada 2018 dan meningkat menjadi 1,81 triliun pada 2020 menunjukkan tren penurunan kemiskinan yang lebih signifikan dari 13% menjadi 10% pada 2023.

Selain Pendidikan, Akses kesehatan pun menjadi perhatian dalam bentuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang lahir sebagai inisiatif pemerintah Indonesia untuk mendukung pembiayaan operasional fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas, demi meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOK memiliki dampak negatif terhadap tingkat kemiskinan, terutama melalui peningkatan akses layanan kesehatan yang lebih terjangkau bagi masyarakat miskin. Dana BOK digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan di tingkat dasar seperti imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan penyakit menular. Implementasi BOK membantu menurunkan beban biaya kesehatan pada keluarga miskin, sehingga masyarakat miskin dapat mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan dan nutrisi. Namun, efektivitas BOK sering kali terkendala oleh masalah distribusi yang tidak merata dan keterbatasan kapasitas pengelolaan di tingkat lokal, sehingga diperlukan pengawasan lebih baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal (Septyantie & Cahyadin, 2013).



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan Tahun 2018-2022

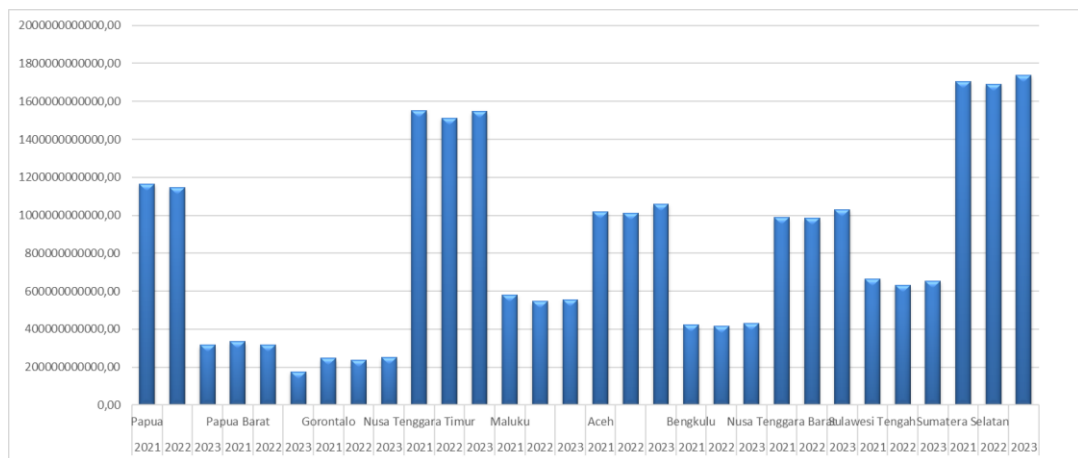
Gambar 1. 5 Anggaran BOK Tahun 2018-2023 di 10 Provinsi Termiskin (Rupiah)

Grafik di atas menunjukkan alokasi anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada 10 provinsi termiskin di Indonesia selama periode 2018 hingga 2023. Dapat dilihat bahwa ada fluktuasi yang signifikan dalam jumlah anggaran yang diterima oleh setiap provinsi sepanjang tahun-tahun tersebut. Provinsi-provinsi seperti Papua dan Papua Barat mencatatkan anggaran BOK yang sangat tinggi pada tahun 2022 dan 2023, menunjukkan peningkatan perhatian terhadap sektor kesehatan di wilayah-wilayah ini.

Secara umum, alokasi BOK tampak mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini mengindikasikan upaya pemerintah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang lebih membutuhkan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan akibat berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Meskipun ada peningkatan, beberapa provinsi seperti Bengkulu dan Aceh menunjukkan variasi yang lebih kecil, yang

bisa berarti adanya perbedaan dalam pengelolaan anggaran atau faktor lain yang memengaruhi penyaluran dana.

Selain program bantuan-bantuan, pemerintah Indonesia juga telah mengalokasikan sumber daya yang cukup besar melalui kebijakan lainnya untuk menanggulangi kemiskinan secara lebih komprehensif, salah satunya adalah melalui penggunaan Dana Desa. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, meskipun hasilnya bervariasi antar desa. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti perbaikan akses terhadap air bersih, jalan, dan fasilitas kesehatan. Selain itu, dana desa juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan kemampuan produktif masyarakat desa melalui pelatihan dan pemberdayaan usaha kecil. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh masalah alokasi yang tidak tepat sasaran, rendahnya kapasitas pengelolaan dana di tingkat desa, dan potensi penyalahgunaan anggaran, yang dapat berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan (Wijaya et al., 2018).



Sumber: DJPK Kementerian Keuangan Tahun 2021-2022

Gambar 1. 6 Anggaran Dana Desa Tahun 2021-2023 di 10 Provinsi Termiskin (Rupiah)

Grafik di atas menunjukkan alokasi anggaran Dana Desa untuk 10 provinsi termiskin di Indonesia selama periode 2018 hingga 2023. Tampak bahwa alokasi Dana Desa untuk beberapa provinsi, seperti Papua dan Papua Barat, mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022 dan 2023, yang mengindikasikan peningkatan perhatian pemerintah terhadap pembangunan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Peningkatan anggaran Dana Desa ini kemungkinan besar dimaksudkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat yang dapat membantu mengurangi kemiskinan.

Provinsi-provinsi lainnya, seperti Nusa Tenggara Timur, Aceh, dan Bengkulu, juga menunjukkan pola peningkatan anggaran Dana Desa, meskipun dengan variasi yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dana yang diterima lebih rendah dibandingkan dengan Papua, fokus pembangunan di daerah-daerah tersebut tetap menjadi prioritas. Namun, ada juga provinsi seperti Sumatera Selatan yang memiliki anggaran Dana Desa lebih stabil, mengindikasikan adanya konsistensi dalam distribusi bantuan untuk pembangunan desa.

Berdasarkan beberapa permasalahan dalam latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti suatu penelitian dengan judul **Pengaruh Kebijakan Bantuan Sosial Pangan Non-Tunai (BSPNT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan : (Studi Kasus 10 Provinsi Termiskin di Indonesia pada tahun 2018-2023)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dengan mempertimbangkan kondisi kemiskinan di Indonesia dan upaya pemerintah dalam menanggulangnya, dapat dirumuskan berbagai masalah, yaitu

1. Bagaimana pengaruh secara parsial bantuan sosial pangan non tunai, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan di sepuluh provinsi termiskin di Indonesia tahun 2018-2023 ?
2. Bagaimana pengaruh secara bersama-sama bantuan sosial pangan non tunai, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan di sepuluh provinsi termiskin di Indonesia tahun 2018-2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi di atas, dapat disusun beberapa tujuan penelitian yang spesifik dan terukur. Tujuan-tujuan ini akan menjadi panduan dalam melaksanakan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh. Berikut adalah tujuan penelitian yang dirumuskan :

1. Menganalisis pengaruh secara parsial bantuan sosial pangan non tunai, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan di sepuluh provinsi termiskin di Indonesia tahun 2018-2023
2. Mengkaji pengaruh secara bersama-sama bantuan sosial pangan non tunai, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan di sepuluh provinsi termiskin di Indonesia tahun 2018-2023

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah uraian mengenai kegunaan penelitian ini:

1.4.1 Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu di bidang kebijakan publik, ekonomi pembangunan, dan kajian kemiskinan. Melalui analisis pengaruh kebijakan sosial seperti bantuan sosial pangan non tunai, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, dan dana desa penelitian ini diharapkan memperkaya pemahaman multidimensional tentang pengentasan kemiskinan di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, sekaligus menawarkan perspektif baru tentang efektivitas dan sinergi kebijakan tersebut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Akademisi

Penelitian ini menjadi acuan untuk kajian pengentasan kemiskinan dan evaluasi kebijakan publik di daerah tertinggal, khususnya terkait bantuan sosial pangan non tunai, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, dan dana desa yang minim diteliti. Temuannya memperkaya literatur akademik dan membuka peluang penelitian lanjutan.

1.4.2.2 Masyarakat

Bagi masyarakat, terutama di daerah yang menjadi lokasi penelitian, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi tentang efektivitas kebijakan sosial yang dijalankan pemerintah. Masyarakat dapat lebih memahami bagaimana kebijakan seperti bantuan sosial pangan non tunai, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, dan dana desa mempengaruhi kehidupan masyarakat miskin, serta mengetahui bagaimana cara memanfaatkan program-program tersebut dengan lebih optimal.

1.4.2.3 Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan membantu pemerintah merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, mengevaluasi implementasi bantuan sosial pangan non tunai, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, dan dana desa di sepuluh provinsi termiskin, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program sosial.

